

**MENDETEKSI TIMBULNYA FRAUD TERKAIT PENTAGON FRAUD THEORY,
FRAUD TRIANGLE THEORY KK10, DAN FRAUD DIAMOND THEORY**

Eka Nur Azizah, Muhammad Alqafi

Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Kota Metro, Lampung.

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: fajineka9495@gmail.com , Muhhammad_alqafi@teknokrat.ac.id | No. Telp: | |
| Submitted 7 Juni 2024 | Accepted 11 Juni 2024 | Published 18 Juni 2024 |

Abstract

Accurate financial reporting is crucial for demonstrating a company's health amidst intense global competition. However, the quest for accuracy often leads some companies to resort to manipulation or fraud. This involves presenting false information or omitting crucial details in financial statements to mislead stakeholders. To combat these challenges, theories such as agency theory, fraud triangle, and internal control provide a strong analytical framework for auditors and management to detect, evaluate, and prevent fraud. Analytical tools like the Analytical Hierarchy Process (AHP) are employed to prioritize anti-fraud strategies, ensuring optimal resource allocation. Internal auditors play a pivotal role in strengthening internal control systems by identifying weaknesses and recommending improvements. This enhances the transparency and reliability of financial reporting, laying a robust foundation for sustainable growth and bolstering public trust in the global financial market.

Keyword: *Fraud, Pentagon, Triannge Fraud, Fraud Diamond*

Abstrak

Pelaporan keuangan yang akurat sangat penting untuk menunjukkan kesehatan perusahaan di tengah persaingan global yang ketat, tetapi kebutuhan akan keakuratan ini sering kali mendorong beberapa perusahaan untuk melakukan manipulasi atau kecurangan. Hal ini meliputi penyajian informasi yang salah atau penghilangan informasi penting dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna. Untuk menghadapi tantangan ini, teori seperti teori agensi, segitiga kecurangan, dan kontrol internal memberikan dasar analitis yang kuat bagi auditor dan manajemen untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mencegah kecurangan. Pendekatan analitis seperti Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menetapkan prioritas dalam strategi pencegahan kecurangan, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal. Auditor internal memainkan peran kunci dalam memperkuat sistem pengendalian internal dengan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan serta membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kepercayaan publik dalam pasar keuangan global.

Kata Kunci: Fraud, Pentagon, Triannge Fraud, Fraud Diamond

A. PENDAHULUAN

Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan mendorong perlunya laporan keuangan yang akurat untuk menunjukkan kesehatan dan kekuatan perusahaan. Namun, situasi ini juga dapat mendorong perusahaan untuk melampaui batas dengan melakukan manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan atau fraud merupakan masalah yang umum terjadi di berbagai sektor industri dan ukuran perusahaan, dimana perbuatan tersebut sering kali melibatkan penyajian informasi yang salah atau penghilangan informasi yang penting, yang bertujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Hal ini dilakukan secara sengaja dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2020, jenis kecurangan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama adalah asset misappropriation yang memiliki tingkat kecurangan tertinggi mencapai 86%, kedua adalah corruption dengan tingkat kecurangan 43%, dan ketiga adalah financial statement fraud dengan tingkat kecurangan 10%. Meskipun presentase kecurangan dalam laporan keuangan lebih rendah

dibandingkan jenis kecurangan lainnya, kerugian yang ditimbulkan dari kecurangan dalam laporan keuangan cenderung lebih besar, dengan rata-rata kerugian mencapai \$954,000. Sedangkan, kerugian rata-rata dari asset misappropriation dan corruption adalah \$100,000 dan \$200,000 secara berturut-turut (Setyono, 2023).

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) menggambarkan bahwa kecurangan adalah tindakan disengaja yang melibatkan penyajian yang salah dalam laporan keuangan yang menjadi subjek audit. Kecurangan dalam laporan keuangan umumnya terjadi karena kelemahan dalam sistem pengendalian internal, perilaku manajemen yang tidak baik, atau masalah terkait likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, faktor lingkungan eksternal seperti kondisi industri dan lingkungan bisnis secara keseluruhan dapat juga berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan (Khoirunnisa, 2020).

Fraud pada laporan keuangan bukanlah fenomena baru di sektor industri dan barang konsumsi. Contohnya adalah kasus PT Kimia Farma pada tahun 2001. Kimia Farma, yang merupakan anak usaha dari PT Bio Farma, melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada 4 Juli 2001 dengan laba bersih sebesar Rp 132 miliar. Namun, menurut Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, sekarang OJK), laba tersebut dianggap terlalu tinggi dan mengandung unsur manipulasi. Sebagai hasilnya, dilakukan audit ulang terhadap laporan keuangan Kimia Farma yang mengungkapkan kesalahan mendasar. Laba sebenarnya perusahaan hanya Rp 99,56 miliar, atau 24,7% lebih rendah dari yang diumumkan sebelumnya. Kasus serupa terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) pada tahun 2017, di mana terjadi penggelembungan piutang dari enam perusahaan distributor afiliasi yang dicatat sebagai pihak ketiga, mencatatkan kerugian sebesar Rp 1,4 triliun. Tindakan ini dilakukan dengan persetujuan dari direksi untuk menaikkan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Manajemen juga mengalirkan dana dari perusahaan sebesar Rp 1,78 triliun. Kejahatan ini merugikan pemegang saham dan melanggar perlindungan investor di pasar modal (Syavira, 2023).

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi penting karena mengandung informasi terperinci tentang aktivitas operasional dan keuangan perusahaan selama periode tertentu, serta digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan bagi stakeholder. Pada awal tahun 2020, PT. Asuransi Jiwasraya menarik perhatian publik dengan skandal kecurangan laporan keuangan, dimana mereka membuat laba semu sejak tahun 2006 yang terungkap dalam investigasi BPK. Kasus ini juga melibatkan praktik rekayasa laporan keuangan yang berkelanjutan oleh para akuntan perusahaan tersebut. Kejanggalaan serupa ditemukan pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tahun 2018, dimana dua komisaris menolak menandatangani laporan karena tidak sesuai dengan PSAK. Contoh lain termasuk laporan keuangan Poppy Meilina Dian Hastuti yang mencatatkan laba bersih USD 809.846, naik tajam dari kerugian USD 216,58 juta pada tahun 2017, serta kasus PT Hanson International yang memanipulasi laporan keuangan tahun 2016 dengan mencatatkan penjualan kavling siap bangun senilai Rp732 miliar untuk menaikkan pendapatan secara signifikan dari tahun sebelumnya.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa variabel Fraud Diamond dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, terutama pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel Fraud Diamond secara simultan maupun parsial dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan. Selanjutnya, analisis menggunakan Fraud Pentagon pada perusahaan perbankan dan manufaktur di BEI periode 2013-2016 menemukan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, pergantian auditor, dan pergantian dewan direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur, sementara target keuangan, stabilitas keuangan, pengawasan yang tidak efektif, dan rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan perbankan. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan properti, real

estat, dan bangunan di BEI tahun 2013-2015, menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan tekanan eksternal tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan tersebut (Hastuti, 2023).

Pentingnya laporan keuangan yang jujur adalah krusial bagi semua pihak yang menggunakan informasi tersebut, terutama investor dan kreditor. Manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengakibatkan kerugian besar. Perilaku manajemen yang curang dalam penyajian laporan keuangan menjadi topik menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Peran auditor sangat penting dalam mengurangi kasus kecurangan ini dengan mendeteksi dini, sehingga risiko kecurangan dapat diminimalisir dan kerugian dapat dicegah. Auditor dapat memanfaatkan teori-teori seperti fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan di perusahaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan biografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut dengan cara mencari sumber mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proporsisi dan gagasannya.

C. KAJIAN TEORI

1. Teori Kecurangan Pentagon (Fraud Pentagon Theories)

Teori Pentagon Kecurangan merupakan perluasan dari teori Segitiga Kecurangan yang dikembangkan oleh Cressey. Pada tahun 2009, Jonathan Marks, seorang *partner-in-charge di Crowe Horwath LLP*, memperkenalkan dua elemen tambahan yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Teori ini dikenal sebagai Teori Pentagon Kecurangan Crowe Horwath. Marks memasukkan kompetensi dan arogansi sebagai faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Kompetensi, menurut Marks, mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan sistem kontrol internal dan sosial dalam situasi yang menguntungkan dirinya sendiri, sebagai pengembangan dari elemen kesempatan dalam teori Cressey. Sedangkan arogansi menggambarkan perilaku individu yang merasa superior dan yakin bahwa aturan perusahaan tidak berlaku bagi dirinya (MAHARANI, 2016).

Teori Pentagon Kecurangan, yang diperkenalkan oleh Crowe (2011), terdiri dari lima faktor risiko: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Tekanan mengacu pada motivasi yang mendorong individu untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Annisa, Lindrianasari, dan Asmaranti (2016), yang menjelaskannya sebagai keinginan seseorang yang tertekan untuk melakukan kejahatan, dengan empat jenis kondisi dan situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (SAS No 99): Stabilitas Keuangan, Tekanan Eksternal, Kebutuhan Keuangan Pribadi, dan Target Keuangan. Kesempatan, menurut Nurbaiti dan Hanafi (2017), adalah situasi yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menduduki posisi tertentu di suatu tempat. Kurangnya pengawasan internal perusahaan dapat menyebabkan peluang untuk tindakan kecurangan (fraud). Ada tiga kategori kondisi Kesempatan dalam kecurangan laporan keuangan: sifat industri, pengawasan yang tidak efektif, dan struktur organisasi (SAS No 99). Rasionalisasi, menurut Siddiq dan Hadinata (2016),

adalah adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai moral yang memungkinkan pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, atau orang dalam lingkungan yang tertekan yang membuat orang merasionalisasi tindakan kecurangan (fraud). Dalam sebuah perusahaan, rasionalisasi dapat diukur dengan siklus audit, pendapat audit yang diperoleh oleh perusahaan, dan rasio total akrual dibagi dengan total aset.

Kompetensi, menurut Crowe (2011), adalah keterampilan seorang karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengamati kondisi sosial untuk memenuhi kepentingan pribadi. Nurbaiti dan Hanafi (2017) menyatakan bahwa perubahan dalam dewan direksi untuk meningkatkan kinerja manajemen sebelumnya dapat menyebabkan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Perubahan dalam dewan direksi dapat menyebabkan periode stres yang meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (fraud). Arogansi, menurut Crowe (2011), adalah sifat superioritas dan keserakahan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dan merasa bahwa kontrol internal, kebijakan perusahaan, dan prosedur tidak berlaku untuk mereka (Kholis, 2020).

Teori Pentagon Kecurangan Crowe Horwath memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan motivasi di balik tindakan kecurangan. Ini membantu organisasi dan profesional auditor untuk lebih memahami potensi risiko kecurangan dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam pengelolaan risiko kecurangan.

2. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) KK10

Teori Segitiga Kecurangan, yang diajukan oleh Donald Cressey, seorang kriminolog pada tahun 1950, berdasarkan penelitiannya yang melibatkan 250 pelaku kejahatan untuk memahami alasan di balik kecurangan. Melalui wawancara mendalam, Cressey mengidentifikasi tiga elemen kecurangan: Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi. Tekanan menunjukkan faktor-faktor yang mendorong individu ke perilaku tidak etis, di mana setiap pelaku kecurangan mengalami tekanan sebelum melakukan tindakan tersebut. Tekanan ini bisa berupa tekanan finansial atau non-finansial, dengan tekanan finansial menjadi faktor paling umum yang menyebabkan kecurangan. Skousen dkk. kemudian membagi tekanan menjadi empat elemen: stabilitas keuangan, tekanan eksternal, situasi keuangan pribadi manajer, dan pencapaian target keuangan.

Semakin tinggi tekanan yang dirasakan individu, semakin besar kesempatan terjadi kecurangan, sering kali disebabkan oleh ketidak-efektifan dalam kontrol internal atau sistem tata kelola (SAS No. 99, 2002), yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori: sifat industri, pengawasan yang tidak efektif, dan struktur organisasi. Rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki penerimaan moral terhadap kecurangan sebelum melakukan perilaku tidak etis. Ini melibatkan justifikasi dan penerimaan bahwa tindakan tidak etis berbeda dari kegiatan kriminal. Rasionalisasi merupakan elemen kecurangan yang paling sulit diukur, dengan Skousen dkk. mengukurnya melalui pergantian auditor, total akrual, dan opini audit (Novita, 2019).

Elemen pertama dalam Teori Segitiga Kecurangan adalah tekanan atau pressure. Menurut Pasaribu & Kharisma, tekanan adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, baik itu berasal dari faktor keuangan maupun non-keuangan. SAS Nomor 99 mengidentifikasi empat kondisi tekanan yang dapat memicu kecurangan, seperti stabilitas keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan target keuangan.

Elemen kedua adalah peluang atau opportunity. Peluang didefinisikan sebagai kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan kecurangan dan menghindari penangkapan. Kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya peluang yang tersedia,

bahkan jika seseorang mengalami tekanan yang tinggi. SAS Nomor 99 menyoroti tiga kondisi peluang, termasuk pengendalian internal yang tidak efektif, kondisi industri, dan struktur organisasional.

Elemen ketiga dari Teori Segitiga Kecurangan adalah rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi merupakan pembelaan terhadap perilaku buruk yang dilakukan seseorang. Rasionalisasi tidak hanya sekadar membenarkan tindakan, tetapi juga mencakup pola pikir dan serangkaian alasan yang mendukung tindakan tersebut. Beberapa pelaku kecurangan mungkin tidak merasionalisasikan tindakan mereka sama sekali, dan rasionalisasi umumnya mengikuti dari dua elemen lainnya (Febriandani, 22 C.E.).

Fraud triangle bisa dibandingkan dengan segitiga api, di mana tekanan dapat dianggap sebagai sumber panas yang dapat memicu api. Namun, menurut Lister (2007), tekanan itu sendiri tidak akan cukup untuk mendorong seseorang melakukan kecurangan, kecuali ada faktor lain seperti peluang untuk melakukan kecurangan, yang dapat diibaratkan sebagai bahan bakar yang menjaga api tetap menyala, serta rasionalisasi terhadap tindakan pelanggaran yang berperan seperti oksigen dalam menjaga keberlangsungan api tersebut (Budiwitjacksono, 2017).

3. Teori Kecurangan Berlian (Fraud Diamond Theory)

Fraud diamond adalah konsep baru dalam studi kecurangan yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari teori segitiga kecurangan yang pertama kali diusulkan oleh Cressey pada tahun 1953. Pengembangan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran atas meningkatnya kasus kecurangan dalam laporan keuangan di Indonesia, terutama di sektor transportasi yang sering kali sulit untuk diungkapkan. Selain itu, hal ini juga dipicu oleh tekanan pada manajemen untuk mencapai kinerja terbaik bagi perusahaan, yang kadang-kadang dapat memicu perilaku tidak etis. Fraud diamond menambahkan elemen kualitatif baru yang disebut sebagai kemampuan (capability), yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan. Wolfe dan Hermanson meneliti bahwa kemampuan ini dapat menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong terjadinya kecurangan, dan mereka mengamati bahwa perubahan dalam dewan direksi sering kali terkait dengan kemunculan kecurangan. Meskipun perubahan direksi tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk masalah perusahaan, sering kali hal ini dimanfaatkan untuk menggantikan direksi yang mengetahui atau terlibat dalam kecurangan yang dilakukan (Prayonggie, 3 C.E.).

Fraud diamond merupakan suatu konsep yang mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Konsep ini meliputi tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization), dengan tambahan elemen capability. Capability mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tindak kecurangan, yang dapat meliputi pengetahuan teknis, keterampilan operasional, dan kemampuan untuk memanipulasi atau menghindari sistem pengendalian yang ada.

Dalam konteks ini, capability menjadi faktor kunci yang memungkinkan individu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kecurangan dengan efektif. Kemampuan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan operasional, tetapi juga kemampuan untuk mengelola risiko terdeteksinya kecurangan serta untuk merancang strategi penyembunyian yang kompleks.

Fraud diamond menyoroti bahwa keberadaan capability dapat memperkuat tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang sudah ada, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dengan memahami dan mengidentifikasi capability ini, organisasi dapat mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan

yang lebih efektif, seperti peningkatan pengawasan internal, evaluasi kebijakan dan prosedur, serta pelatihan yang tepat untuk mengurangi potensi risiko kecurangan (Lamawitak, 2021).

Menurut teori Fraud Diamond, tekanan keuangan merupakan salah satu dari empat elemen utama yang mempengaruhi kemungkinan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan keuangan ini muncul ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang mendesak, seperti utang yang besar, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau tekanan untuk mencapai target keuangan yang tinggi. Situasi ini dapat memicu seseorang untuk mencari jalan pintas atau melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya.

Tekanan keuangan sering kali dianggap sebagai motivasi primer dalam tindakan kecurangan karena dapat menyebabkan stress yang signifikan pada individu. Kondisi finansial yang buruk atau tekanan untuk mempertahankan gaya hidup yang tinggi bisa menjadi pemicu kuat bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran etika demi keuntungan pribadi atau untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan (Ambarwati, 2018).

Dalam praktiknya, tekanan keuangan ini sering kali menjadi fokus utama dalam pencegahan kecurangan, karena memahami dan mengelola tekanan keuangan dapat membantu organisasi mengidentifikasi risiko kecurangan yang lebih besar. Strategi pencegahan yang efektif harus mencakup pengawasan yang ketat terhadap situasi keuangan individu, serta peningkatan kesadaran akan potensi konsekuensi dari tindakan kecurangan bagi individu dan perusahaan secara keseluruhan.

4. Strategi Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan

Kecurangan dapat terjadi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk Badan X1. Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Badan X1 dari tahun 2013 hingga 2015 mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Temuan ini menunjukkan bahwa Badan X1 belum menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan masih rentan terhadap kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengurangi risiko kecurangan.

Upaya pencegahan kecurangan di Badan X1 dianggap lebih efektif daripada pendekatan represif, seperti menghindari kerugian negara yang lebih besar serta melindungi reputasi baik institusi dan individu. Selain itu, pencegahan kecurangan yang dilakukan secara proaktif dan sistematis lebih hemat biaya dan lebih efisien daripada mendeteksi kecurangan setelah terjadi (Abdullahi, 2015).

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah alat analisis yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengidentifikasi dan menetapkan prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki terkait dengan masalah yang dihadapi (Saaty, 1993). Model AHP menggunakan masukan dari para ahli sebagai input utama, sehingga strategi yang dihasilkan diharapkan dapat sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah (Kurniasari, 2018).

Fraud dalam sebuah perusahaan seringkali disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya peran auditor internal dalam mengawasi implementasi aturan yang berlaku dalam sistem pengendalian perusahaan. Pencegahan terhadap fraud dengan menggunakan audit internal sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Auditor internal memainkan peran krusial dalam melakukan pengawasan terhadap operasi perusahaan, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan, dan memahami secara menyeluruh lingkup pengendalian internal perusahaan.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) nomor 1 tahun 2017 dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), auditor memiliki tanggung jawab untuk merancang pemeriksaan guna mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Peran auditor internal sangat penting dalam mencegah kecurangan. Semakin tinggi kualitas pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh auditor internal, semakin besar pengaruhnya terhadap pengendalian internal perusahaan. Studi oleh Jayanti (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencegah indikasi kecurangan dengan menyediakan sarana kontrol yang efektif untuk mengantisipasi berbagai potensi kecurangan yang mungkin terjadi (Fatimah, 2022).

Auditor internal dapat menggunakan berbagai pendekatan, seperti merancang rencana audit berdasarkan data kuantitatif yang terdapat dalam database, melakukan survei pendahuluan jika informasi yang tersedia belum memadai untuk audit kecurangan, dan menyusun program audit berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, auditor internal memainkan peran kunci dalam mendeteksi kecurangan di perusahaan dan memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, Inspektorat sebagai bagian dari audit internal pemerintah perlu mengembangkan strategi anti fraud. Strategi ini dirancang untuk mengendalikan kecurangan dengan mempertimbangkan proses terjadinya kecurangan, serta mencakup karakteristik dan cakupan potensi fraud secara komprehensif dan integral. Penerapan strategi anti fraud ini sekaligus merupakan bagian dari implementasi Manajemen Risiko, khususnya dalam konteks sistem pengendalian internal (Ciptaningsih, 2012).

Menurut Ciptaningsih (2012), strategi untuk mencegah kecurangan harus mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Pencegahan
 - 1) Perbaikan sistem pengendalian
 - 2) Penguatan pengawasan
 - 3) Pelaksanaan pemeriksaan rutin
- b. Deteksi
- c. Investigasi, Pelaporan, dan Penerapan Sanksi
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, implementasi sistem pengendalian intern yang baik diperlukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Inspektorat, sebagai lembaga yang ditugaskan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah agar menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Implementasi SPIP diharapkan dapat berfungsi sebagai peringatan dini (early warning) untuk mencegah terjadinya fraud (Rozak, 2017).

D. PEMABAHASAN

Dalam konteks penggunaannya, ketiga teori ini membantu auditor dan manajemen untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mencegah potensi kecurangan. Penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat analisis memungkinkan identifikasi dan penentuan prioritas dalam strategi pencegahan kecurangan. Pentingnya peran auditor internal terletak

pada penguatan sistem pengendalian internal yang merupakan benteng pertahanan utama dalam mengurangi risiko kecurangan.

Auditor internal memiliki tanggung jawab krusial dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal organisasi. Dengan melakukan audit secara menyeluruh, mereka tidak hanya mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur internal, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut. Penerapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik yang direkomendasikan oleh teori-teori tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperkuat keandalan dan kewajaran laporan keuangan mereka.

Secara spesifik, teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik modal dan manajemen, mengidentifikasi potensi kepentingan yang bertentangan dan insentif yang mungkin mendorong perilaku yang tidak jujur. Teori fraud triangle, dengan fokus pada tekanan, peluang, dan rasionalisasi, membantu dalam mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Sementara teori kontrol internal memberikan panduan tentang bagaimana mendesain sistem yang dapat mengidentifikasi dan mencegah kecurangan sebelum terjadi.

Dalam praktiknya, AHP digunakan untuk mengevaluasi kepentingan relatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Dengan metode ini, auditor dan manajemen dapat menetapkan prioritas pada langkah-langkah pencegahan yang paling efektif. Misalnya, mereka dapat menentukan apakah peningkatan pengawasan atau perbaikan dalam prosedur pelaporan keuangan lebih penting dalam konteks perusahaan mereka.

Terakhir, peran auditor internal dalam memperkuat pengendalian internal sangat penting untuk mencegah risiko kecurangan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas audit keuangan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mengelola risiko, menyarankan perbaikan prosedur, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dengan demikian, mereka membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa teori-teori seperti teori agensi, fraud triangle, dan kontrol internal memberikan landasan yang kuat bagi auditor dan manajemen untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mencegah potensi kecurangan dalam sebuah organisasi. Penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat analisis membantu dalam menetapkan prioritas dalam strategi pencegahan kecurangan, memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif.

Peran krusial auditor internal dalam memperkuat pengendalian internal tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka berperan penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan penerapan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh teori-teori ini, perusahaan dapat meningkatkan keandalan dan kewajaran laporannya.

Secara keseluruhan, integrasi teori-teori ini dan penggunaan AHP sebagai alat analisis memberikan pendekatan yang holistik dan sistematis dalam pencegahan kecurangan. Auditor dan manajemen bekerja sama untuk membangun lingkungan yang tidak hanya transparan tetapi juga kuat dalam mengelola risiko kecurangan, menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan stakeholder mereka.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, J. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMUNGKINAN TERJADINYA SALAH KELOLA ASET TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND THEORY (STUDI EMPIRIS PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 5(2), 174.
- Budiwitjaksono, W. dan G. S. (2017). FRAUD TRIANGLE SEBAGAI PENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 49.
- Fatimah, K. (2022). ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KENCENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 239.
- Febriandani, M. S. (22 C.E.). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENYEBAB KECURANGAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4(11), 3.
- Hastuti, P. M. D. (2023). Fraud Pentagon Theory Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan di Sektor Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 614.
- Khoirunnisa, A. (2020). Fraud Pentagon Theory dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII 70) Tahun 2018. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(1), 98.
- Kholis, N. (2020). MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS TEORI FRAUD PENTAGON. *JRKA*, 8(2), 75.
- Kurniasari, N. T. (2018). STRATEGI PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 25.
- Lamawitak, P. L. (2021). PENGARUH FRAUD DIAMOND THEORY TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) PADA KOPERASI KREDIT PINTU AIR. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 59.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia : 2004)
- MAHARANI, A. S. (2016). ANALISIS FRAUD PENTAGON THEORY DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 1(1), 5.
- Novita, N. (2019). TEORI FRAUD PENTAGON dan DETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN. *JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO)*, 11(2), 65.
- Prayonggie, R. S. (3 C.E.). ANALISIS FRAUD PENTAGON THEORY DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*, 1(2022), 36.
- Rozak, D. A. (2017). PERANAN STRATEGI ANTI FRAUD DAN AUDIT KEPATUHAN DALAM MENCEGAH FRAUD PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS. *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 49.
- Setyono, D. (2023). Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1036.
- Syavira, C. (2023). Fraudulent Financial Statement: Pengujian Fraud Pentagon Theory Pada Sektor Industri Dan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 112.